

Analisis Yuridis Pembentukan Undang-undang Perbankan Syariah

Aprinisa

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya konsekuensi yuridis UU Perbankan dan UU BI saja, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Tujuan undang-undang tersebut adalah mendukung terwujudnya sistem perbankan syariah, yang selain patuh terhadap prinsip syariah, juga dapat memberikan jasa keuangan secara efisien dan berhati-hati. Namun demikian, mengenai urgensi pengaturan perbankan syariah dalam undang-undang yang perlu dilihat bukan hanya dari aspek keuangan, tetapi juga implementasi aturan tersebut dalam memenuhi rasa keadilan aspek syariah dan hukum positif.

Ditinjau dari sisi syariah sebagai serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi pemeluknya, mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajarannya secara menyeluruh, integral dan komprehensif, maka pelaksanaannya harus tercermin dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi, dan industri perbankan. Sedangkan ditinjau dari aspek hukum positif terkait dengan implementasi pasal 29 UUD 1945 ke dalam kehidupan perekonomian bangsa, negara berkepentingan memberikan dasar hukum bagi setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat.

Kata Kunci: *perbankan syariah*

I. PENDAHULUAN

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara faktual terus menguat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya terutama sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). Eksistensi bank syariah bahkan semakin diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (UU BI) yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis UU Perbankan dan UU BI saja, akan tetapi

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional.

Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga;
2. Terciptanya *dual banking sistem* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral;
3. Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia;
4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997 menunjukkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan dan memiliki kinerja lebih baik di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini minimal terlihat pada angka NPFs (*Non Performing Financings*) yang lebih rendah dibanding sistem konvensional, tidak adanya *negative spread*, dan konsistensinya dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*ghharar*), dan spekulatif (*maysir*). UU Perbankan (1998) dan UU BI menjadi era baru bagi perbankan syariah di Indonesia. Jumlah bank tumbuh dengan pesat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1998, menjadi 3 bank umum syariah, 18 Unit Usaha Syariah dan 88 BPRS pada akhir tahun 2004 dengan jumlah jaringan kantor (*network*) sebanyak 443 kantor yang tersebar di 20 provinsi. Namun demikian, kontribusinya terhadap total perbankan nasional masih sangat kecil, yaitu sebesar Rp.15,3 triliun (1,3 %) meskipun aset perbankan syariah mencapai rata-rata pertumbuhan lebih dari 80 % per tahun pada periode 1998-2004. Demikian pula yang terjadi pada dana pihak ketiga pada akhir tahun 2004 telah mencapai Rp.11,6 triliun (1,2 %) dan penyaluran dana sebesar Rp.11,5 triliun (1,7 %). Dengan demikian selama sepuluh tahun berkiprah, total pangsa pasar bank maupun institusi syariah baru mampu mencapai sekitar 1 % dari pangsa pasar nasional. Sementara Malaysia yang sudah beroperasi 20 tahun pangsa pasarnya mencapai 6,9 %. Artinya, dalam 10 tahun telah berhasil membukukan pangsa pasar 3,45 % atau 27,6 kali lebih besar dari Indonesia.

Sebagai suatu industri baru, ternyata adanya UU Perbankan dan UU BI saja tidak cukup untuk mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia, meski dari Undang-undang Perbankan tersebut telah lahir ketentuan pelaksanaannya berupa Keputusan Direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Selain mengatur bank syariah, kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain akan menciptakan diversifikasi risiko keuangan secara beragam, yang akhirnya dapat mengurangi problem risiko sistemik pada saat terjadi krisis keuangan. Artinya pengembangan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional.

Namun di sisi lain, dalam operasionalnya, dapat membawa konsekuensi terjadinya benturan hukum yang disebabkan adanya perbedaan yang prinsip antara ketentuan hukum yang berlaku bagi bank konvensional dengan bank syariah. Kegiatan bisnis perbankan syariah di luar aspek syariah mencakup berbagai aspek hukum termasuk hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum dagang. Karena hukum yang diberlakukan tersebut bersifat umum, maka pada bagian-bagian tertentu akan terdapat permasalahan yang tidak terhindarkan lantaran adanya kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah, dan dengan demikian akan juga mempengaruhi hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya.

Perkembangan bank syariah suatu negara memang sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu. Dalam hal ini Sudin Haron (2001) berpendapat bahwa "*Islamic banks have to conform to two types of law, Syariah law and positive law.*" Hukum positif adalah yang dibuat oleh otoritas kewenangan atau pemerintah dari suatu negara. Di negara-negara muslim, bank syariah dilaksanakan dalam berbagai tingkatan: dengan ketentuan yang terbatas atau non eksis (seperti di Algeria dan Maroko), berdampingan dengan sistem bank konvensional (seperti di Mesir dan negara-negara Teluk / GCC), atau yang dilaksanakan secara menyeluruh menurut prinsip syariah (seperti Pakistan dan Iran).

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan di negara-negara non muslim, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana penjelasan di atas cukup kondusif terhadap praktik perbankan dengan prinsip syariah karena konfigurasi politik

yang demokratis dan produk hukum yang responsif terhadap perkembangan perbankan syariah. Namun pelaksanaan *dual banking system* akhir-akhir ini mulai banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan, baik praktisi, akademisi maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah. Undang-undang yang ada dinilai belum cukup mendorong percepatan perkembangan perbankan syariah dan oleh karena itu ada keinginan agar perbankan syariah diatur lebih rinci daripada aturan-aturan yang selama ini ada pada perbankan yang disadari baru mengatur sebagian kecil perbankan syariah, meskipun tetap dalam koordinasi satu otoritas, yaitu Bank Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan fenomena di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah bagaimana relevansi UU Perbankan dan UU BI serta peraturan pelaksanaannya dalam mengatur perbankan syariah menurut kondisi kekinian (lokal dan global), dan apakah perlu pengaturan perbankan syariah secara lebih terinci dan mandiri.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan. Tersusunnya norma-norma kegiatan usaha perbankan syariah yang seragam (standarisasi) dan tidak terdapat pengaturan yang kontradiktif dalam tatanan sistem hukum nasional maupun global yang mencakup antara lain norma penghimpunan dana, penyaluran dana, penerbitan produk dan jasa, lembaga-lembaga yang terkait, dan pengaturan hukum terkait lainnya. Selain itu juga dapat mewujudkan mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan baik instrumen maupun badan terkait.
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan perbankan syariah yang berbasis kepada pengendalian risiko dan pengelolaan yang berhati-hati serta didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien. Terwujudnya perbankan syariah yang memiliki daya saing dan efisiensi yang tinggi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Daya saing dan efisiensi yang dicapai baik dalam standar nasional maupun internasional.
4. Terciptanya stabilitas lembaga keuangan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Bank syariah dapat berperan serta dalam mewujudkan sistem keuangan yang stabil, memenuhi kebutuhan layanan jasa perbankan syariah

masyarakat di seluruh Indonesia dengan menawarkan jasa perbankan syariah yang terbuka bagi seluruh golongan masyarakat baik muslim maupun non-muslim.

III. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas maka dalam penulisan ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori, dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

IV. PEMBAHASAN

Perlu diamati realitas penerapan hukum dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengkaitkannya dengan prinsip perbankan syariah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, kegiatan usaha bank pada dasarnya dimulai dari ketentuan pendirian bank (*entry regulations*) yaitu persyaratan perizinan dari segi entitas hukum, pemilik, dan pengurus (komisaris dan direksi).

Selanjutnya ketentuan operasional yang dibagi dalam tiga kegiatan utama perbankan pada umumnya yaitu sisi penghimpunan dana, sisi penyaluran dana, dan sisi penyediaan pelayanan jasa perbankan. Kegiatan usaha pada ketiga aspek utama tersebut pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia. Pada tahapan transaksi yang terkait dengan perikatan antara bank dengan nasabah, perikatan dilakukan atas dasar hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan hukum perdata positif yang lainnya.

Aspek yang terakhir adalah pengaturan pencabutan ijin usaha dan likuidasi bank dengan memperhatikan kedudukan bank sebagai badan hukum dan pertanggungjawaban kegiatan usaha terhadap para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Di lain pihak, perkembangan bank syariah telah memunculkan kaidah-kaidah atau prinsip pengaturan baru dalam aspek kegiatan usaha bank yang diadopsi dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist yang juga harus konsisten dan harmonis mengatur aspek pendirian, kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan ijin usaha dan likuidasi.

Hukum syariah dalam kegiatan usaha bank yang telah dipraktekan seperti prinsip bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), prinsip jual-beli (*Murabahah, Salam, Istishna*), sewa atau sewa-beli (*Ijarah dan Ijarah Muntahya Bitamlik*) dan prinsip prinsip syariah lainnya. Aspek lainnya adalah manajemen bank yang terdiri dari pemilik dan pengurus keterkaitan atau dukungan kelembagaan yang terkait dengan peradilan, arbitrase, dan lembaga pengawas syariah.

1. **Pendirian Bank (*Entry Regulations*)**

Permohonan pendirian bank syariah dilakukan melalui tahapan izin prinsip dan izin usaha yang diterbitkan oleh otoritas perbankan (Bank Indonesia). Hal-hal yang penting untuk diamati dalam aspek hukum pendirian bank adalah aspek kepemilikan dan kepengurusan.

Terkait dengan kepemilikan maka ketentuan UU Perbankan Pasal 22 menyatakan bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Pasal 23 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Dalam prinsip Syariah maka bank syariah harus dikaitkan dengan Islam sebagai suatu sistem hidup (*way of life*) di mana manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam surat Al Maa'idah ayat 48 dinyatakan bahwa "... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...". Dengan demikian Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal.

Komprehensif berarti syariah mencakup seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah, sedangkan universal dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Memperhatikan aspek komprehensif dan universal tersebut maka syariah sebenarnya tidak menganut asas pembatasan kepemilikan sehingga kepemilikan bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah sebaiknya juga dibuka untuk badan hukum asing sepanjang mendorong atau memberikan kontribusi yang besar bagi kemakmuran dan kemaslahatan umat.

Dalam prakteknya BPR Syariah memiliki peranan yang besar dalam pembiayaan usaha kecil namun banyak yang terkendala dengan modal yang terbatas. Dengan dibukanya peluang bagi badan asing untuk dapat memiliki BPR Syariah dengan asas kemitraan dengan pemilik nasional maka diharapkan kendala permodalan akan teratasi.

Badan hukum asing juga akan membawa teknologi dan manajemen yang relatif lebih maju sehingga akan meningkatkan kualitas manajemen BPR Syariah.

2. Kegiatan Usaha

Sebagaimana lazimnya lembaga bank atau lembaga intermediasi keuangan, kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya meliputi 4 (empat) kegiatan pokok yaitu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penawaran produk dan pelayanan jasa keuangan, serta pengelolaan usaha (manajemen intern).

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Penghimpunan dana masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 6 butir a UU Perbankan diatur sebagai berikut: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 butir c menyatakan bahwa bentuk penghimpunan dana selain giro, tabungan dan deposito dapat dilakukan dalam bentuk menerbitkan surat pengakuan hutang.

Penghimpunan dana sebagaimana ditentukan Pasal 6 UU Perbankan tersebut diterapkan untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Istilah simpanan (Pasal 6 butir a) mencakup giro, tabungan, dan deposito karena pengaturan substansi adalah dana yang disimpan dan bank wajib mengembalikan dana seutuhnya termasuk kewajiban bunga. Dalam konteks prinsip syariah, simpanan dapat diterapkan pada *prinsip* giro atau tabungan *wadiah*, sedangkan untuk tabungan atau deposito *mudharabah* lebih tepat disebut dengan istilah investasi, karena *mudharabah* merupakan hubungan kerjasama investasi bukan simpanan.

Demikian pula dengan ketentuan bahwa bank dapat menerbitkan surat pengakuan hutang (Pasal 6 butir c), dalam konteks kegiatan bank umum konvensional, hal ini merupakan kegiatan yang lazim dilakukan, namun dalam kegiatan syariah, menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat pengakuan hutang, karena sifatnya pengakuan hutang bukan suatu investasi, maka pengaturan untuk bank syariah harus lebih dipertegas lagi, yaitu apakah bank syariah diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik dana.

b. Penyaluran Dana Masyarakat

Mengenai penghimpunan dana masyarakat, UU Perbankan mengatur bahwa usaha bank umum memberikan kredit (Pasal 6 butir b), membeli surat-surat berharga dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Pasal 6 butir d), menempatkan dana pada bank lain (Pasal 6 butir f), melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (Pasal 6 butir j)

dan menyediakan pembiayaan dan atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan Bank Indonesia (Pasal 6 butir m).

Kegiatan penyaluran dana lainnya adalah melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 7 butir a), melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 7 butir b), melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 7 butir c).

Dikaitkan dengan prinsip syariah maka penyaluran kredit (Pasal 6 butir b) dalam pengertian penyaluran dana dengan menarik imbalan bunga tidak diperbolehkan. Demikian pula membeli surat-surat berharga dan SBI serta penempatan dana pada bank lain (Pasal 6 butir d dan f) perlu dicermati dengan pengaturan yang jelas bahwa pembelian surat berharga dan SBI serta menempatkan dana pada bank lain tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah.

Bentuk-bentuk penyaluran dana lainnya yang merupakan kegiatan utama bank syariah seperti skema jual-beli atau "*deferred payment sale*" (*Murabahah*), piutang dengan pembayaran dimuka atau "*in front payment sale*" (*Salam*) dan piutang dengan pembayaran bertahap atau "*purchase by order*" (*Istishna*) dan pinjaman secara gadai "*pawning*" (*rahn*) belum ditetapkan secara jelas dalam perundang-undangan.

c. Produk dan Jasa

Pengaturan jasa perbankan dalam UU Perbankan untuk bank umum adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (Pasal 6 butir e), menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (Pasal 6 butir g), menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (Pasal 6 butir h), melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Pasal 6 butir i), melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat (Pasal 6 butir l), melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 6 butir n).

Pada dasarnya kegiatan jasa yang dilakukan oleh bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 butir e, g, h, i, l, dan n adalah kegiatan yang juga lazim dilakukan oleh bank syariah. Dalam Pasal 6 butir l ditetapkan bahwa bank dapat melakukan kegiatan

kartu kredit yang dapat membawa pengertian kredit sebagaimana umumnya yang mengandung bunga. Dengan demikian perlu kiranya ditetapkan secara tegas bahwa kegiatan jasa tersebut dilakukan tanpa mengandung hal-hal yang dilarang oleh prinsip syariah.

Demikian pula dengan pengaturan untuk BPR Syariah ditentukan bahwa BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (Pasal 14 butir b) atau melakukan penyertaan modal (Pasal 14 butir c). Adanya ketentuan ini akan rancu dengan karakter usaha bank syariah yang memiliki produk utama perkongsian "*partnership, project financing participation*" (*musyarakah*) dan mendukung kegiatan jual-beli valuta asing "*money changer*" (*sharf*) dalam rangka mendukung pariwisata, perdagangan, dan pelayanan umrah/haji yang dewasa ini sudah mulai dibutuhkan masyarakat di kawasan luar kota di mana BPR Syariah berada.

d. Pengelolaan Bank

Dalam pengelolaan bank ini akan difokuskan kepada pelaksanaan batas maksimum fasilitas dana bank bagi pihak terkait dan tidak terkait. Sebagaimana diatur pada UU Perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan (Pasal 11 ayat 1) batas maksimum tersebut ditetapkan tidak boleh melebihi 30 % dari modal bank (Pasal 11 ayat 2) dan maksimum 10 % dari modal bank bagi pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal disetor bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, keluarga pihak pemegang saham, komisaris atau direksi, pejabat bank lainnya, dan perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak terkait tersebut (Pasal 11 ayat 3 dan 4).

Dengan adanya ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank (Pasal 11 ayat 3 dan 4) tersebut maka akan membuka kesempatan adanya diskriminasi atau *self dealing* terhadap fasilitas dana bank oleh pengurus bank. Dikaitkan dengan prinsip syariah yang berasaskan keadilan (*justice*) dan kejujuran (*fairness*) serta larangan menzalimi terhadap pihak lain maka adanya pembukaan batas maksimum tersebut tidak sesuai dengan tujuan bank syariah yang akan membentuk lembaga bank yang memiliki kredibilitas yang tinggi, amanah, dan transparan. Sebaiknya pengaturan fasilitas dana kepada pihak terkait tersebut tidak diakomodir dalam bank syariah.

V. PENUTUP

Mengingat kekhususan operasionalnya dan keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki serta memperhatikan hasil penelitian yang menunjukkan tingginya harapan dan dukungan terhadap bank syariah, kerangka pengaturan yang belum memadai, dukungan pemerintah yang kondusif, pertumbuhan volume usaha yang pesat, perkembangan lembaga keuangan syariah internasional, serta hasil kajian perbandingan terhadap negara-negara yang telah mempraktekkan perbankan Islam, maka perbankan syariah membutuhkan ketentuan dalam tingkatan undang-undang yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah mendukung terwujudnya sistem perbankan syariah yang selain patuh terhadap prinsip syariah, juga dapat memberikan jasa keuangan secara efisien dan berhati-hati. Namun demikian, mengenai urgensi pengaturan perbankan syariah dalam undang-undang yang perlu dilihat bukan hanya dari aspek keuangan saja tetapi juga implementasi aturan tersebut dan memenuhi rasa keadilan aspek syariah dan hukum positif.

Ditinjau dari sisi syariah sebagai serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi pemeluknya, mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajarannya secara menyeluruh, integral dan komprehensif, maka pelaksanaannya harus tercermin dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi termasuk industri perbankan. Sedangkan ditinjau dari aspek hukum positif terkait dengan implementasi pasal 29 UUD 1945 ke dalam kehidupan perekonomian bangsa, negara berkepentingan memberikan dasar hukum bagi setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat.

Dengan memperhatikan bahwa perbankan syariah Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian global, maka lahirnya bank syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh praktik perbankan Islam di beberapa negara. Dari praktik pengaturan perbankan syariah di berbagai negara seperti Malaysia, Pakistan, Sudan, Yordania, dan Iran terbukti bahwa negaranegara tersebut telah memiliki pengaturan perbankan syariah tersendiri setingkat undang-undang dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan bank syariah yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Substansi yang perlu diatur dalam undang-undang perbankan syariah meliputi tapi tidak terbatas pada perizinan, kepemilikan, bentuk badan hukum, struktur organisasi dan manajemen, permodalan, jenis kegiatan usaha, cakupan rahasia bank, penilaian kesehatan bank, pengawasan syariah, pasar keuangan, instrumen pasar uang, likuidasi, sanksi pidana, serta isu-isu yang berkembang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi perbankan syariah memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang yang lebih rinci tetapi fleksibel dapat mengatur kepentingan semua *stakeholders*.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Antonio, Muhammad Syafii. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press

Haron, Sudin. 2001. *Islamic Banking*. Selangor-Malaysia: Selangor Darul Ehsan

Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

_____, 2000. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Usman, Rachmadi. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

_____, 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

II. Karya Ilmiah dan Artikel Surat Kabar/Koran:

A. Basha and Sami M. Khalil. "Monetary Policy in Moslem Countries with A Dual Banking Sistem", International Conference on Islamic Banking, University of Wollongong, International Business Research Group, Sydney : 9 – 10 November 1993.

Dhani Gunawan Idat. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Volume 3 Nomor 1 April 2005.

Harisman. "*Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Kondisi Terkini dan Strategi Pengembangan*", dalam *Republika*, Senin, 3 Juni 2002.

Mulya E. Sitegar dan Nasirwan. "*Tantangan Perbankan Syariah*", dalam *Republika*, Jum'at, 30 Agustus 2001.

Republika. *Satu Dasawarsa Jejak Bank Syariah di Indonesia: Malangnya Menjadi Tempelan*. Jumat, 5 April 2002.

Ryan Kiryanto. *Menyoal Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah*. Suara Karya. Edisi Senin 10 Desember 2001.

III. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.